

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Ekawati, Evy Lusia, Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, (Yogyakarta: Genta Pers, 2013), Halaman 53.

Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung Alumni, 2004).

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprillia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Freidman, Lawrence M, American Law (London: W.W Norton & Company, 1984).

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Ishaq, H, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Mahendra, Yusril Ihza, Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012).

Marbun. BN, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006).

- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999).
- Mustofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Rawls, John, A Theory of Justice, (Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971).
- Rawls, John, Teori Keadilan (A Theory Of Justice), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prastyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Ronny, Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Sidharta, Bernard Arif, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Pondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta CV, 2013).
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penulisan Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Anjani, Ajeng Kartika, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa", Jurist-Diction, Vol. 2 No. 3. Mei 2019.

Daud, Darma Ayu, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara", (Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Hukum-Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2018).

Juliano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Jurnal Crepido (Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum), Volume 01, No.01, Juli 2019.

- Nasution, Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." Jurnal Yustisia, Vol.3 No 2. Mei-Agustus 2014.
- Pamungkas, Gerry, "Indenpendensi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara.", (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).
- Putra, Agus Kelana, Faisal A. Rani dan Mahdi Syahbandir, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.", Syiah Kuala Law Jurnal Vol. 1(2), Agustus 2017.
- Rusdianto, "Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negar Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia.", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1, Juni 2015.
- Simanjuntak, Juristoffel, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)", Lex Administratum, Vol. Vi/No. 1 Januari-Maret 2018.
- Syafrudin, Ateng "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab." Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan Bandung, 2000.
- Yusuf, Muhammad, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam

Lingkum Perdata Dan Tata Usaha Negara", Jurnal Yustika, Vol. 21 No. 2, Desember 2018.

D. Sumber-Sumber Lain

Data perkara Perdata bidang DATUN Kejati Jateng (Diperoleh pada 13 Desember 2020).

Data perkara TUN bidang DATUN Kejati Jateng (Diperoleh pada 13 Desember 2020).

Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I.

Nur Agus Susanto, "DIMENSI AKSIOLOGIS DARI PUTUSAN KASUS "ST" (Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012)", (Artikel Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Panduan Jaksa Agung Muda Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-018/A/J.A/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Purwanti, Ani, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kejaksaan Republik Indonesia. 2016. Profil Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.Kejaksaan.go.id/profil_Kejaksaan.php?id=6, (Diakses pada 6 Oktober 2020).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang:

http://sipp.ptunsemarang.go.id/list_perkara/page/1 (Diakses pada 8 Januari 2021).